Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 97-105	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	-----------

REINTEGRASI SOSIAL KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI P2TP2A DKI JAKARTA

Ervani Faradillah Rahman¹; Hery Wibowo²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran;

²Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Sosial, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 45363

ervani18001@mail.unpad.ac.id¹; hery.wibowo@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dikalangan orang dewasa melainkan anak-anak dapat menjadi korban dari kekerasan seksual. Dengan angka kasus yang semakin meningkat, Departemen Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai upaya memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Adapun tahapan yang dilakukan setelah pemberian layanan dianggap selesai yaitu reintegrasi sosial. Penelitian ini membahas mengenai pemahaman yang menyeluruh dari Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif guna memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pelaksanaan reintegrasi sosial saat dan sebelum pandemi, tahapan tertentu dari pelaksanaan reintegrasi sosial, serta terdapat peluang dan hambatan dari pelaksanaan reintegrasi sosial di P2TP2A DKI Jakarta.

Kata Kunci: Reintegrasi Sosial, Kekerasan Seksual Anak, P2TP2A DKI Jakarta

ABSTRACT

Sexual violence does not only occur among adults but children can become victims of sexual violence. With the increasing number of cases, Department of State Minister for Women's Empowerment, Minister of Health, and Head of the Indonesian National Police established the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) as an effort to provide services for women and children victims of violence. The stages that are carried out after the provision of service are complete is social reintegration. This study discusses a comprehensive understanding of the social reintegration of victims of child sexual violence in P2TP2A DKI Jakarta. This study was conducted using descriptive qualitative methods in order to provide a comprehensive understanding of the topic discussed. The results showed that there were differences in the implementation of social reintegration during and before pandemic, certain stages of the implementation of social reintegration, and opportunities and obstacles of the implementation of social reintegration in P2TP2A DKI Jakarta.

Key Words: Social Reintegration, Child Sexual Violence, P2TP2A DKI Jakarta.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 97-105	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	-----------

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual semakin hari terjadi semakin intensif tidak hanya pada kalangan dewasa tetapi sudah merambah ke kalangan anak-anak. Anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual sebab masyarakat memposisikan kedudukan anak sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya, dan memiliki ketergantungan kepada orang dewasa disekitarnya. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh *Human Rights Reference* dalam Hanifah, Santoso, dan Asiah (2019), disebutkan bahwa kelompok rentan seperti para pengungsi, *Internally Displaced Persons (IDPs)*, kaum minoritas, para pekerja migran, *indigenous people*, anak-anak, dan kaum perempuan menjadi lebih beresiko terlanggar hak-haknya dan lebih mudah menjadi korban dalam situasi yang merugikan. Syahputra (2018) turut menyatakan bahwa pelecehan seksual terhadap anak diakibatkan oleh adanya penyimpangan hasrat seksual serta kekuatan fisik yang dimiliki anak tidak memungkinkan untuk melawan.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang 1 Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Dari seluruh jumlah tersebut, jika dirincikan terdapat 2556 korban kekerasan seksual, 1111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis, 346 korban penelantaran, 73 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan 68 korban eksploitasi. Sebanyak 3296 korban anak perempuan dan 1319 korban anak laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa angka yang paling tinggi yaitu angka korban kekerasan seksual dan kekerasan lebih banyak dialami oleh korban anak perempuan.

Dengan mempertimbangkan angka kasus yang terus meningkat dan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada

perempuan dan anak, maka Departemen Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk lembaga khusus sebagai upaya pelayanan kepada perempuan dan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Tamimi & Humaedi, 2017). Berdasarkan informasi dari KEMENPPPA, P2TP2A merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

P2TP2A dibentuk dengan misi khusus untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi upaya promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Setiap upaya yang dilaksanakan diselenggarakan secara komprehensif berjejaring dengan instansi pemerintah dan masyarakat terkait dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya perempuan dan anak korban kekerasan. Seluruh layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hasil penelitian oleh Afnita, Bahri, dan Rosita (2019) menyatakan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam menangani kasus terbagi kedalam tiga

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 97-105	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	-----------

tahapan yaitu pencatatan, identifikasi intervensi yang diperlukan hingga dilanjutkan dengan pemberian layanan. Layanan yang diberikan meliputi layanan kesehatan, layanan konseling, layanan hukum, dan rehabilitasi sosial. Setelah pemberian layanan dianggap selesai maka dilanjutkan dengan melakukan pemulangan dan reintegrasi sosial. Berdasarkan Pasal 92 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Reintegrasi sosial diartikan sebagai sebuah proses penyiapan anak, anak sebagai korban, dan/atau anak sebagai saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat (Aprilianda, 2017). Pelaksanaan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan penting dilakukan sebagai upaya mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak, melindungi anak dari persoalan sosial lain, serta mengembangkan potensi sosialnya sebagai generasi penerus bangsa (Yuningsih & Dwimawanti, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan melakukan pembahasan dan penelitian yang lebih mendalam mengenai gambaran Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif mengenai Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta digunakan sebagai strategi inquiri yang menekankan pada pencarian makna mengenai suatu fenomena secara alamiah dan holistik, yang disajikan secara naratif dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi tanpa campur tangan manusia (Yusuf, 2003; Moleong, 2013; Ghony & Almanshur, 2012). Metode deskriptif juga digunakan pada penelitian ini guna menjabarkan data yang diperoleh

mengenai Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta dengan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah aktual (Sugiyono, 2011). Melalui pendekatan yang telah dijabarkan, peneliti mencoba menggambarkan realitas sosial secara apa adanya dan tidak berdasar atas hipotesis. Tujuannya adalah memberikan penjelasan dan pemahaman yang menyeluruh secara luas dan mendalam mengenai Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta.

REINTEGRASI SOSIAL

Reintegrasi sosial merupakan upaya penyatuan kembali klien dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi klien. Proses ini terdiri dari komponen yang berbeda, termasuk tinggal dilingkungan yang aman dan terlindungi, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, kesempatan untuk pengembangan pribadi, pengembangan sosial dan ekonomi, dan akses kepada dukungan sosial dan dukungan emosional. Dengan adanya reintegrasi sosial, korban kekerasan seksual anak dapat kembali pada lingkungan sosialnya dan kembali menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari (KEMENPPA, 2010; Surtees, 2017 dalam Primayanti, 2019)

Reintegrasi sosial diartikan sebagai proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Meyer Nimkoff dan William F. Ogburn dalam buku karya Niniek Sri Wahyuni dan Yusniati yang berjudul *Manusia dan Masyarakat*, syarat berhasilnya pelaksanaan reintegrasi sosial ialah bahwa tiap warga masyarakat merasa saling dapat mengisi kebutuhan antara satu sama lain, tercapainya konsensus (kesepakatan)

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 97-105	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	-----------

mengenai nilai dan norma-norma sosial, dan norma-norma berlaku cukup lama dan konsisten.

Berdasarkan Pasal 92 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Reintegrasi sosial diartikan sebagai sebuah proses penyiapan anak, anak sebagai korban, dan/atau anak sebagai saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat (Aprilianda, 2017). Pelaksanaan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan penting dilakukan sebagai upaya mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak, melindungi anak dari persoalan sosial lain, serta mengembangkan potensi sosialnya sebagai generasi penerus bangsa (Yuningsih & Dwimawanti, 2021).

Disisi lain, dalam pendekatan ilmu kesejahteraan sosial, untuk mencapai keberhasilan reintegrasi sosial dibutuhkan berbagai upaya seperti: 1. Bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat, 2. Bimbingan sosial hidup masyarakat, 3. Bimbingan Pembinaan Bantuan Stimulan Usaha Produktif (SUP), 4. Bimbingan usaha atau kerja produktif, dan 5. Penyaluran (Sakidjo, 2002; Wahyuni & Yusniati, 2007; Pramuwito, 1996 dalam Asisah & Nurhayati, 2017). Tahapan reintegrasi merupakan salah satu upaya pengembalian hak-hak klien sebab korban kekerasan seksual seringkali diberikan stigma negatif terhadap keberadaannya sehingga kurang bebas dalam beraktivitas sosial (Muhammad, 2019).

KEKERASAN SEKSUAL ANAK

Kekerasan seksual terhadap anak diartikan oleh *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional dalam Sari (2009) sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua yang memposisikan anak sebagai pemuas kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan ini

dilakukan dengan adanya ancaman, paksaan, suap, tipuan bahkan tekanan yang tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban melainkan dalam bentuk perkosaan ataupun pencabulan.

Menurut Lyness dalam Maslihah (2006), kekerasan seksual anak meliputi tindakan meyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak, dan sebagainya. Jenis kekerasan tersebut dibagi kedalam dua kategori berdasarkan identitas pelaku yaitu; 1. *Familial Abuse* dimana kekerasan seksual yang terjadi berada didalam keluarga inti atau pelaku dan korban masih dalam hubungan darah. Hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua seperti ayah tiri, kekasih, ataupun pengasuh. 2. *Extra Familial Abuse* diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Relasi ini biasanya anak dibujuk kedalam situasi dimana pelecehan tersebut dilakukan dengan adanya imbalan tertentu yang tidak didapat oleh anak di dalam relasi keluarga.

Dalam melakukan kekerasan seksual anak, terdaat tahapan yang dilakukan oleh pelaku sebagai upaya mencoba mengukur kenyamanan korban. Ketika korban menuruti, maka kekerasan akan berlanjut dan intensif. Tahapan tersebut berupa: 1. *Nudity* (dilakukan oleh orang dewasa); 2. *Disrobing* (orang dewasa membuka pakaian di depan anak); 3. *Genital Exposure* (dilakukan oleh orang dewasa); 4. *Observation of the child* (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air); 5. Mencium anak yang memakai pakaian dalam; 6. *Fondling* (Meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong); 7. Masturbasi; 8. *Fellatio* (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri); 9. *Cunnilingus* (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku); 10. *Digital Penetration*

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 97-105	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	-----------

(pada anus atau rectum); 11. *Penile Penetration* (pada vagina); 12. *Digital penetration* (pada vagina); 13. *Penile penetration* (pada anus atau rectum); 14. *Dry intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban (SgROI dalam Tower, 2002).

Penyebab dari terjadinya kekerasan seksual anak dapat dilihat dari sisi pelaku maupun sisi korban. Dari sisi pelaku, kekerasan seksual anak kerap terjadi karena adanya faktor kelainan saraf atau penyakit kejiwaan sehingga tidak mampu mengendalikan emosional dan nafsu seksual, ringannya sanksi yang dikenakan kepada pelaku memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengulangi perbuatannya, serta adanya motif balas dendam sebagai akibat dari masa lalu pelaku yang mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanak sehingga denda tersebut dilampirkan kepada anak-anak lain. Jika dilihat dari sisi korban, kekerasan seksual anak terjadi akibat dari ketidakpedulian dan kurangnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan sehingga kekerasan seksual terjadi tanpa disadari oleh korban, keengganan pihak keluarga korban untuk melaporkan kasus yang terjadi akibat pelaku merupakan kerabat korban sehingga kasus yang terjadi dianggap sebagai aib keluarga, minimnya bukti dan saksi serta sulitnya meminta keterangan dari anak yang menjadi korban sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti kasus tersebut, dan pada beberapa kasus hakim tidak menjatuhkan vonis pidana secara maksimal terhadap pelaku sehingga pihak korbandan keluarga merasa tidak mendapatkan keadilan (Aryani, 2016).

PELAYANAN KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI P2TP2A DKI JAKARTA

Sejalan dengan visi dan misi dibentuknya P2TP2A yaitu memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak

korban tindak kekerasan, setiap pelayanan yang diberikan kepada korban diawali dengan proses aduan kasus lewat *call center* pada jam kerja yaitu 7.30-16.00 di hari kerja. Setiap aduan yang diterima oleh *call center* akan dikelola terlebih dahulu untuk menentukan apakah diperlukan penjangkauan atau dapat dialihkan pada kantor pusat. Pada beberapa kasus perlu dilakukan penjangkauan oleh pendamping korban dimana mereka menjemput atau mendatangi tempat dimana korban berada.

Pada pelayanan kasus kekerasan seksual anak, pendamping korban berkoordinasi dengan stakeholder yang berada dilingkungan terdekat korban misalnya RT, RW, maupun tokoh masyarakat guna menjauhkan korban dari adanya ancaman pelaku akibat aduan kasus yang dilakukan. Tahap selanjutnya yang dilalui adalah dilakukan asesmen awal untuk mengetahui kronologi dari kasus yang dilaporkan. Pada tahap ini termasuk juga mempertimbangkan harapan atau kebutuhan yang dinyatakan oleh korban sebagai klien untuk menentukan pelayanan apa saja yang selanjutnya diberikan. Hal tersebut dilakukan sebab pelayanan yang diberikan kepada klien harus berdasar atas kebutuhan persetujuan dari klien. Pelayanan yang dapat diberikan berupa pendampingan ke kepolisian, pendampingan psikis, pendampingan fisik berupa visum, maupun pengobatan medis.

Hasil dari penjangkauan yang dilakukan oleh pendamping korban untuk selanjutnya diserahkan kepada manager kasus sebagai pemegang penuh aduan kasus. Manager kasus dapat menentukan *Plan of Treatment* yang berdasar pada kebutuhan dan persetujuan klien untuk melanjutkan pada tahap pelayanan selanjutnya. Manager kasus dapat membuat agenda dengan para profesi terkait seperti konseling psikologis dengan psikologi ataupun konsultasi hukum dengan advokat

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 97-105	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	-----------

yang tersedia di P2TP2A. Jika pelayanan dirasa sudah memenuhi kebutuhan klien, maka manager kasus memiliki keputusan untuk melakukan terminasi. Terminasi dapat terjadi atas putusan klien maupun putusan dari profesi yang terlibat dalam penanganan aduan kasus. Pelayanan dapat diberhentikan ketika klien sudah merasa aman dan kebutuhannya sudah terpenuhi ataupun profesi pemberi layanan merasa pelayanannya sudah mencukupi kebutuhan klien. Sebelum dilakukannya terminasi, terdapat tahap persiapan pemulangan klien korban kekerasan seksual anak dimana lingkungan sekitar klien dipersiapkan untuk dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Hal tersebut dicapai dengan upaya reintegrasi sosial.

REINTEGRASI SOSIAL KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI P2TP2A DKI JAKARTA

Reintegrasi sosial yang dilaksanakan di P2TP2A dilakukan sebelum pemulangan klien dan merupakan upaya untuk memastikan klien dapat diterima di lingkungan rumahnya serta lingkungan masyarakat tempat tinggal klien. Reintegrasi sosial yang dilakukan pada korban kekerasan seksual anak dilakukan sebab lingkungan sangat mempengaruhi dalam proses pemulihan.

Reintegrasi sosial yang dilakukan di P2TP2A DKI Jakarta pada faktanya masih berjalan tetapi belum adanya peraturan tertulis sebab masih berada dalam proses pengajuan pada pihak pusat. Reintegrasi sosial yang dilakukan bersifat pendampingan dimana hingga tahun 2019, reintegrasi sosial dilakukan di setiap pos pengaduan dengan pendamping korban yang tersebar di beberapa wilayah tetapi pada tahun 2020-2021 sudah tidak berlaku lagi atau dengan kata lain pendamping korban tidak melayani reintegrasi sosial di pos pengaduan karena kondisi pandemi. Hal tersebut dilakukan karena reintegrasi sosial merupakan

kegiatan yang dilakukan dekat dengan lingkungan masyarakat sehingga pada saat pandemi reintegrasi sosial hanya dapat diakses di P2TP2A pusat sebagai upaya mengurangi kontak fisik. Dari pendamping korban yang berjumlah 22 orang dan tersebar di setiap pos pengaduan, saat ini pendamping korban yang ditugaskan hanya berjumlah 5 orang di tingkat provinsi yang bertanggung jawab di 5 kota di DKI Jakarta. Adapun pos pengaduan yang tersebar berjumlah 2 di pos pengaduan Jakarta Pusat, 2 pos pengaduan di Jakarta Utara, 6 pos pengaduan di Jakarta Barat, 5 pos pengaduan di Jakarta Timur, dan 4 pos pengaduan di Jakarta Selatan. Pada kasus kekerasan seksual anak, tidak setiap kasus dilakukan tahap reintegrasi sosial. Tahap ini dilakukan ketika adanya permintaan serta persetujuan dari klien pada tahap kontrak dilembar pernyataan pemberian pelayanan selama menjadi klien di P2TP2A.

Selanjutnya, tahapan reintegrasi sosial yang dilakukan di P2TP2A DKI Jakarta diawali dengan mendatangi stakeholder yang berada di masyarakat terdekat klien seperti RT, RW, maupun tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan sebab pada fakta di lapangan, ketika kasus kekerasan seksual anak terjadi maka informasi kejadian akan cepat tersebar di lingkungan terdekat klien. Sehingga pihak stakeholder sudah mengetahui lebih dulu mengenai informasi kasus yang terjadi. Langkah selanjutnya yang dilakukan ialah rebug warga dan hanya melibatkan stakeholder saja dan diskusi tidak dilakukan secara terbuka sebab isu yang ditangani merupakan isu yang sensitif sehingga informasi kejadian tidak tersebar lebih luas lagi. Kegiatan yang dilakukan adalah pendamping korban memberikan edukasi mengenai proses yang dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta dalam menangani masalah klien dan sudah sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada klien serta apa yang harus dilakukan oleh pihak stakeholder sebagai upaya pemulihan klien.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 97-105	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	-----------

Hal yang difokuskan dalam edukasi tersebut adalah menguatkan adanya sikap *non-judgmental* terhadap klien khususnya kasus kekerasan seksual anak yang sudah meluas dan diketahui banyak pihak. Penayadaran masyarakat mengenai sikap *non-judgemental* dibutuhkan sehingga klien dapat hidup dengan aman dan nyaman terlebih lagi di lingkungan terdekat tempat tinggal klien. Pelaku dari kekerasan seksual anak juga tidak dilibatkan dalam proses reintegrasi sosial sebab seringkali korban mengingat kembali kejadian yang dialami ketika melihat kehadiran pelaku sehingga tokoh yang dilibatkan adalah orang-orang yang dipercaya dapat melindungi klien dalam proses pemulihan klien.

Pada pelaksanaan reintegrasi sosial kasus kekerasan seksual anak, tidak hanya pendamping korban yang terlibat melainkan melibatkan profesi dibidang lain seperti hukum dan psikolog sehingga informasi yang diperoleh dapat diintegrasikan. Informasi yang disampaikan kepada stakeholder pelaksanaan reintegrasi sosial juga menyangkut mengenai informasi apa saja yang sudah disampaikan kepada klien oleh setiap profesi yang menangani klien bersangkutan.

Terdapat adanya peluang dan hambatan dari pelaksanaan reintegrasi sosial di P2TP2A DKI Jakarta yaitu sebagai peluang, terdapat keeratan yang dibangun dengan tokoh masyarakat berdampak pada terungkapnya kasus lain yang membutuhkan layanan sebab klien pada kondisi tertentu enggan untuk melaporkan kasus yang dialami. Sehingga memberikan peluang kepada P2TP2A DKI Jakarta untuk mengetahui korban Kasus terhadap Perempuan dan Kasus terhadap Anak. Disisi lain, hambatan yang dihadapi yaitu terdapat kemungkinan petugas yang mendatangi klien bertemu dengan pelaku, sebab sebisa mungkin pelaku tidak menyadari kehadiran petugas yang memberikan layanan terhadap

klien. Selain itu, hambatan lain yang dirasakan khususnya dimasa pandemi adalah keterbatasan jumlah pendamping korban yang saat ini bertugas. Hal ini menjadi salah satu hambatan sebab re-integrasi sosial bukan hanya menghubungkan klien dengan masyarakat saja, melainkan diperlukan pendalaman mengenai kasus yang dialami klien. Dengan keterbatasan pendamping korban disetiap provinsi, maka pendamping korban yang bersangkutan memiliki tanggung jawab pada setiap kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di wilayahnya.

KESIMPULAN

P2TP2A DKI Jakarta merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan tiga tahapan yaitu pencatatan, identifikasi, dan intervensi. Setelah intervensi dilakukan dan dianggap selesai, maka dilanjutkan dengan pemulangan dan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan upaya penyatuan kembali klien dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi klien korban kekerasan seksual anak. Reintegrasi sosial dilakukan sebelum pemulangan klien dan dilakukan untuk memastikan klien dapat diterima kembali di lingkungan tempat tinggalnya. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial di P2TP2A saat pandemi dan sebelum pandemi dimana saat pandemi pendamping korban berjumlah sangat terbatas dengan 5 orang yang bertanggung jawab di setiap wilayah DKI Jakarta. Tahapan reintegrasi sosial dimulai dengan mendatangi stakeholder yang dianggap dapat melindungi dan memberikan rasa aman terhadap klien lalu dilanjutkan dengan rebug warga. Terdapat peluang serta hambatan yang dihadapi yaitu terbangunnya kepercayaan dari tokoh

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 97-105	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	-----------

masyarakat serta hambatan yang dihadapi yaitu kemungkinan bertemu dengan pelaku kekerasan seksual anak dan keterbatasan sumber daya manusia saat pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnita, E., Bahri, S., & Rosita, D. (2019). UPAYA P2TP2A BANDA ACEH DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling*, 4(4).
- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, 10(2), 309-332.
- Aryani, N. M. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. *Kertha Patrika*, 38(1).
- Asisah, S. (2017). Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 23-38.
- Ghony, D., & Almanshur, F. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hanifah, H., Santoso, M. B., & Asiah, D. H. S. (2019). ANAK SEBAGAI KELOMPOK RENTAN YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA DAN SITUASI KEKERASAN LAINNYA. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 97-108.
- Moleong, L. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tamimi, S. F., & Humaedi, S. (2017). MANAJEMEN KASUS TINDAK KEKERASAN ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK P2TP2A PROVINSI DKI JAKARTA. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 115-120.
- Kompas.com. 2020. Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 ada 2556 Korban kekerasan Seksual. Diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>. Diperoleh pada 7 Mei 2021.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/P>. Diperoleh pada 7 Mei 2021.
- Maslihah, Sri. (2006). "Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang". *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.1 (1).25-33.
- Muhammad, L. (2019). PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN BIMBINGAN KEMANDIRIAN DI BALAI KEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(2), 178-189.
- Primayanti, D. (2019). *Proses Reintegrasi Korban Human Trafficking Yayasan Kusuma Bongas di Bongas Indramayu* (Doctoral dissertation).
- Sari, A. P. (2009). Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban. Diunduh dari <http://kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28/>
- Syahputra, R. (2018). Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Lex Crimen*, 7(3).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tower, Cynthia Crosson. (2002). *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: Allyn & Bacon

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 97-105	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	-----------

Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2021). Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 249-260.

Yusuf, A. M. 2014. *Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.